RUANG LINGKUP PASAR MODAL

Artikel Yang Membahas Tentang Hukum Lahan Pertanian Dan Hukum Ketenagakerjaan

OLEH : AINUL YAQIN [90500120081]

PROBLEM BIDANG PERTANIAN

Indonesia adalah Negara agraris sebab sekitar 80% dari penduduknya dari pencahariannya dari sector pertanian Namun dalam kenyataannya komoditas pertanian tidak pernah menjadi penyangga utama dari perekonomian Indonesia Sector pertanian juga belum pernah menempatkan produk pertanian sebagai primadona komoditas ekonomi Indonesia Nasib petani di Indonesia tidak semakin sejahtera bahkan semakin lama semakin terpuruk Penguasaan lahan pertaniannya semakin menyempit,bahkan tidak sedikit yang akhirnya kehilangan kepemilikan lahan pertaniannya dan berubah menjadi buruh tani

Problem Lahan Pertanian

Persoalan lahan pertanian senantiasa menjadi problem yang tidak pernah ada habisnya Bahkan dapat di katakana sepanjang sejarah manusia,problem pengusaha lahan pertanian senantiasa mewarnai dinamika kehidupan manusia Penjajahan Negara perang besar antara Negara perang antara penduduk kampung juga tidak terlepas dari persoalan lahan pertanian ini Termasuk di Indonesia berbagai kerusakan akibat persengketaan lahan,terus menerus mewarnai kehidupan baik itu persengketaan antar individu antara perusahaan dengan masyarakat antara Negara dengan perusahaan

maupun antara Negara dengan masyarakat.

Solusi Sistem Ekonomi Kapitalisme

Pandangan system ekonomi kapitalis dalam pengaturan penguasaan lahan pertanian adalah:

- Setiap individu bebas untuk memiliki lahan pertanian.
- Setiap individu bebas untuk memanfaatkan lahan pertaniannya untuk di tanami apapun.
- juga Setiap individu bebas untuk mengembangkan dan memperbesar kepemilikan lahan pertaniannya

Dampak Sistem Ekonomi Kapitalisme

Munculnya persaingan bebas dalam kepemilikan lahan pertanian Terjadinya ketidakseimbangan dalam penguasaan lahan pertanian Pemilik lahan pertanian besar akan semakin besar dan terus melakukan ekspansi untuk memperbesar kepemilikan lahannya Petani pemilik lahan kecil akan semakin sempit penguasaan lahannya Petani-petani akan kehilangan kepemilikan lahannya dan akhirnya hanya menjadi buruh tani Puncaknya adalah terjadinya feodalisme dalam bidang pertanian

Solusi Sistem Ekonomi Sosialisme

Sosialisme memandang bahwa penyebab utama terjadinya ketidakadilan dalam penguasaan lahan pertanian adalah feodalisme Solusinya adalah dihapuskannya hak kepemilikan secara mutlak bagi setiap individu Negaralah yang berperan dalam mengatur aspek produksi penjualan distribusi serta penentuan upah rakyatnya dalam bidang pertanian Sebagian sosialisme memandang hanya kepemilikan lahan produktif yang di larang sedangkan kepemilikan lahan konsumtif di perbolehkan Sosialisme yang lain menganjurkan land reform pembagian kembali secara sama seluruh lahan pertanian di suatu

Negara

Dampak Sistem Ekonomi Sosialisme

Menyebabkan produktivitas pertanian Negara sosialis menjadi merosot di banding Negara eropa yang kapalitas Penyebabnya adalah hilangnya motivasi berproduksi dari rakyatnya akibat di hapuskannya hak kepemilikan dan rendahnya upah buruh oleh Negara Di terapkannya system land reform ternyata juga mengakibatkan keadaan yang serupa Penghapusan hak kepemilikan dal leform adalah tidakan zalim terhadap rakyat Karena telah mencabut hak kepemilikan lahan

Solusi Menurut Aqal Manusia

Sistem ekonomi kapitalisme kepemilikan lahan pertanian adalah bebas System ekonomi kapitalisme kepemilikan lahan pertanian ada 3 kemungkinan: Kepemilikan lahan di larang secara keseluruhan Hanya kepemilikan lahan pertanian saja yang di larang Kepemilikan lahan pertanian dibagi rata

Solusi Sistem Ekonomi Islam

Apakah system ekonomi islam akan mampu menyelesaikan dua problrm di bidang pertanian tersebut sekaligus? Dua problem tersebut adalah: Problem feodalisme Problem demotivasi berproduksi Solusi dari system ekonomi islam yang di peroleh dari metode induktif adalah hukum syari'at yang bersifat umum yaitu penyetujuan kepemilikan lahan pertanian dengan produksinya

Proses Induksi Intiqro

Solusi hukum syari'at umum di atas I induksi dari 3 hukum syariat sekaligus,yaitu: Hukum menghidupkan tanah mati Huku larangan menterlantarkan lahan pertanian selama lebih tiga tahun Hukum larangan menyewakan lahan pertanian Dari tiga hukum syari'at tersebut di tarik hukum syari'at umum yaitu penyetujuan kepemilikan lahan pertanian dengan produksinya

Hukum Ihya'ul Al-Mawat

Hukum ini membolehkan setiap individu untuk memiliki lahan mati tanaman budidaya bangunan dan sebagainya dengan cara memagarinya seluas apapun yang ia kehendaki dengan satu syarat harus mengidupkannya mengelola lahannya atau menanaminya

SOLUSI TERHADAP DUA PROBLEM PERTANIAN

Peningkatan produksi pertanian Islam memberi kebebasan bagi individu untuk memiliki lahan sebarang luasnya selama masih mampu memproduksinya Hal itu di harapkan tidak ada lahan kosong yang menganggur sehingga semua lahan di harapkan akan produktif Islam juga membebaskan pengembangan komoditas pertanian untuk menjamin terjadinya di ferifikasi di bidang pertanian Dengan adanya kepemilikan individu produktivitas pertanian terus meningkat karena motivasi berproduksi tetap terjaga Problem rendahnya produktifitas karena demotivasi berproduksi sebagaimana dalam pertanian socialisme dapat teratasi.

HUKUM KETENAGAKERJAAN

Ketenagakerjaan atau biasa dikenal dengan istilah perburuhan itu adalah faktor produksi kedua yang akan diatur oleh perekonomian. Faktor produksi ada tiga yaitu lahan, tenaga kerja dan permodalan. Dalam ekonomi pasar bebas, permasalahan ketenagakerjaan senantiasa menimbulkan banyak problem yang seakan tak berujung pangkal. Posisi tenaga kerja atau kaum buruh dalam ekonomi kapitalisme akan senantiasa tertindas.

DIAGRAM ALIR EKONOMI PASAR BEBAS

Problema Perburuhan (ketenagakerjaan) Permasalahan yang paling krusial dalam ketenagakerjaan adalah menyangkut pemberian kompensasi atau upah yang harus di berikan oleh pihak yang mempekerjakan kepada pihak yang dipekerjakan. Masalah inilah yang

dapat menimbulkan konflik yang berkepanjangan antara pekerja dan pemberi kerja, sehingga membutuhkan pengaturan dan penataan lebih lanjut dengan hukum-hukum tertentu.

PANDANGAN EKONOMI KAPITALISME

Posisi kaum buruh dalam ekonomi kapitalisme hanya akan ditempatkan sebagai salah satu komponen faktor produksi. Konsekuensinya, dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan yang setinggi-tingginya, maka upah buruh sebagai salah satu faktor produksi harus ditekan serendah rendahnya. -Dari sinilah kemudian muncul istilah hukum upah besi atau the iron wage's law, yaitu: upah buruh tidak dapat dinaikkan dan tidak dapat diturunkan. -Upah buruh akan tetap bertengger pada posisi untuk sekedar pemenuhan kebutuhan fisik minimum(KFM)-nya saja.

PANDANGAN EKONOMI SOSIALISME

Menurut sosialisme, kaidah ketenagakerjaan yang adil adalah pekerjaan bagi pekerja itu sesuai dengan kemampuan atau kesanggupan, sedangkan upah bagi pekerja itu sesuai dengan kerjanya. Upah untuk seorang pekerja akan ditentukan berdasarkan barang yang diproduksinya. Sedangkan seluruh biaya produksi akan dikembalikan kepada satu unsur saja, yaitu kerja.

PERUBAHAN DALAM EKONOMI ISLAM

- Dari QS.AZ-Zukhruf:32
- Dari dalil "Aisyah radliallahu 'anha:Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan Abu Bakar menyewa seorang dari suku Ad-Dil kemudian dari suku 'Abdi bin 'Adiy sebagai petunjuk jalan dan yang mahir menguasai seluk beluk perjalanan" (HR Bukhari).
- Dari QS.Ath-Thalaq:6).
- Dari Hadis "Tiga orang yang Aku musuhi pada hari kiamat nanti, adalah orang yang telah memberikan (baiat kepada Khalifah)

karena Aku,lalu berkhianat; orang yang menjual (sebagai budak) orang yang merdeka,lalu dia memakan harga (hasil) penjualannya; serta orang yang mengontrak pekerja kemudian pekerja tersebut menunaikan pekerjaannya, sedang orang itu tidak memberikan upahnya" (HR Ahmad,Bukhari,Ibnu Majah dari Abu Hurairah).

DEFINISI IJARAH DALAM ISLAM

Ijarah arti bahasa berasal dari akar kata al-ajru, yaitu upah atau kompensasi. Menurut istilah syar'i, Ijarah adalah akad atas manfaat dengan pengganti kompensasi (iwadh). Berdasarkan jenis manfaat, ada 3 macam ijarah:

1. Ijarah untuk manfaat benda atau barang, disebut penyewaan benda. Misalnya: penyewaan mobil, komputer, AC, rumah dll.
2. Ijarah untuk manfaat perbuatan. Misalnya: jasa dokter, arsitek, bimbingan belajar, kursus,dll.
3. Ijarah untuk manfaat orang. Misalnya: menjadi pegawai, karyawan, pembantu,buruh,dll.

RUKUN IJARATUL-AJIR

1. Al-'Aqidani (dua pihak yang berakad), yaitu yang menyewa (musta'jir) dan yang disewa atau yang dipekerjakan (muajjir atau ajjir).
2. Al-Ma'qud 'alaihi (objek akad), yaitu manfaat dan upah.
3. Shighat, yaitu apa saja yang menunjukkan ijab dan kabul, perkataan maupun perbuatan.

A. SYARAT AL-'AQIDAANI

- Baligh (mumayyiz=7 tahun).
- Berakal (gila,mabuk:tidak sah).
- Merdeka (bukan budak).
- Tidak ada paksaan (ikhtiyar).

B. SYARAT MANFAAT

- Manfaat harus mubah -Manfaat harus ma'lum (diketahui dengan jelas)
- Manfaat harus dapat diserahterimakan (Taslim)
- Manfaat tidak boleh menghilangkan zat sumber manfaat.
- Manfaat harus mempunyai nilai (mutawwam).
- Manfaat harus dapat dinikmati yang menyewa (musta'jir)

a. Manfaat Harus Mubah

Manfaat tidak boleh manfaat yang haram, misal: menjadi pegawai pabrik khamr, menjadi pelacur, menjadi pegawai bank ribawi, dll.

b. Manfaat Harus Ma'lum

Manfaat harus ma'lum (jelas) dan tidak boleh majhul (tidak jelas).

Agar manfaat itu jelas, maka ada 3 unsur, yaitu:

1. Bentuk dan jenis pekerjaan (nau'ul-'amal)
2. Masa kerja (Muddatul-'amal)
3. Tenaga yang dicurahkan saat bekerja (judhul-'amal).

Jika manfaat itu jelas, maka dapat ditentukan upahnya dengan jelas pula. Dari 2 prinsip inilah KONTRAK KETENAGA KERJAAN dapat dibuat.

PEMBUATAN KONTRAK TENAGA KERJA

1. Dalam pembuatan akad kontrak itu diharuskan berisi klausul-klausul yang benar-benar, jelas (ma'lum), yang dapat difahami oleh kedua belah pihak.
2. Dalam membuat akad kontrak kerja tidak boleh mengandung klausul-klausul yang belum jelas (majhul).
3. Untuk penentuan akad kontrak kerja yang ma'lum atau jelas, paling tidak ada 4 unsur yang harus diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu oleh pekerja dan pemberi kerja.

UNSUR KONTRAK TENAGA KERJA

1. Jenis pekerjaan (nau'ul-'amal)
2. Masa kerja (Muddatul-'amal)
3. Upah kerja (ujratul-'amal)
4. Tenaga yang dicurahkan (juhdul-'amal)

Jenis pekerjaan (nau'ul-'amal)

- Jenis pekerjaan harus jelas spesifikasinya dalam akad kontrak kerja.
- Jenis kerja tidak boleh terlalu umum, sehingga menimbulkan bias.
- Jika masih kabur, maka hukumnya adalah rusak (fasad).
- Seorang pekerja diharapkan akan dapat mengukur kemampuan dan kesanggupan dalam melaksanakan tugasnya.
- Jika majikan akan memberi pekerjaan diluar tugasnya, maka pekerja bisa menolak atau meminta tambahan kompensasi. Kecuali, jika itu hanya bersifat tolong-menolong, maka tidak perlu ada kompensasi tambahan.

Masa kerja (Muddatul-'amal)

Ketentuan penyebutan waktu dalam aqad ljarah, ada 3 :

- Kontrak kerja yang hanya perlu menyebutkan takaran pekerjaannya saja, tanpa harus menyebutkan masa kerjanya. Misalnya membuat baju model tertentu.
- -Kontrak kerja yang hanya menyebutkan masa kerjanya, tetapi tidak menentukan takaran kerjanya. Misalnya menjadi sopir selama 1 hari.
- -Kontrak kerja yang perlu menyebutkan masa kerjanya, sekaligus menyebutkan takaran kerjanya. Misalnya: membangun rumah tipe 45 selama 3 bulan.

Ketentuan untuk Masa Kerja ljarah untuk manfaat orang Dalam akad kontrak ini wajib mencantumkan masa kerjanya. Sebab, jika masa kerja tidak disebutkan dalam akad kontrak tersebut, maka akan menimbulkan ketidakjelasan (majhul) dalam akad kontraknya.

Upah kerja (ujratul-'amal)

Upah (gaji) harus disebutkan dalam aqad kontrak tenaga kerja. Dalil dari hadis Rasul SAW "Apabila salah seorang di antara kalian mengontrak (tenaga) seorang pekerja, maka hendaklah ia beritahukan kepadanya upahnya (gajinya)" (HR. Ad-Daruqudni). Jika upahnya tidak jelas (majhul), maka akad kontrak kerjanya tidak sah.

DASAR PENENTUAN KERJA

Sebagai perbandingan pada dasar penentuan upah kerja adalah sebagai berikut:

1. Menurut ekonomi kapitalisme, upah didasarkan pada taraf kebutuhan fisik minimum (KFM), yang dirumuskan dalam UMR atau UMP.
2. Menurut ekonomi sosialisme, upah didasarkan pada nilai tenaga yang dicurahkan.
3. Menurut ekonomi Islam, upah didasarkan pada manfaat yang diberikan pekerja buruh.

SYARAT UPAH KERJA

- Syarat untuk upah (ujrah): secara umum, syarat upah adalah sama dengan syarat harga. Kaidah fiqih "Apa saja yang dapat menjadi harga dalam jual beli, dapat menjadi upah dalam ljarah."
- syarat upah kerja ada 6 adalah sebagai berikut :
 1. Upah harus berupa harta (maal) yang mubah, bukan harta yang haram, misalnya hasil mencuri.
 2. Upah harus berupa harta suci (Thahir), bukan harta yang najis, misalnya babi.
 3. Upah harus diketahui dengan jelas (ma'luum), bukan majhul.
 4. Upah harus dapat dimanfaatkan (muntafa'an bihi).
 5. Upah harus dapat diserahterimakan.
 6. Upah harus hak milik yang menyewa (musta'jir).

- Tenaga yang dicurahkan (judhul-'amal)

Ukuran tenaga yang dicurahkan harus tertuang dalam aqad. Allah SWT melarang membebani seseorang diluar kemampuannya: "Allah SWT tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya" (QS.Al-Baqarah:286). Untuk memudahkan yang mendekati batasan tersebut, dapat digunakan pendekatan hitungan jam kerja dalam sehari. Sehingga, pembatasan jam kerja ini dapat dijadikan sebagai ukuran yang jelas untuk menentukan besarnya tenaga yang harus dikeluarkan oleh seorang pekerja.

➤ SYARAT JA'LI

Syarat ja'li (teknis, administratif), yaitu syarat tambahan yang dapat dibuat sendiri oleh kedua belah pihak yang berakad. Syarat ja'li ini hukumnya mubah (boleh), dengan syarat tidak melanggar hukum syariah. Contohnya adalah:dua pihak yang berakad menetapkan syarat teknis administratif,yaitu:

- o Jam kehadiran dan kepulangan.
- o Seragam kerja.
- o Sanksi pelanggaran kerja.
- o Ketentuan kerja lembur dsb.

KEUNGGULAN EKONOMI ISLAM

- Kaum buruh tidak akan ditindas lagi oleh majikannya,sebab mereka akan bisa memperoleh upah sesuai dengan manfaat yang telah diberikan kepada majikannya. Jika manfaat yang diberikan tinggi,maka dia berhak mendapat upah yang tinggi sebaliknya. Upah tidak disamaratakan ,yang hanya didasarkan kepada kebutuhan fisik minimum (KFM) dari pekerjaanya untuk hidup dalam sebulan saja.

- Pihak majikan juga tidak akan dirugikan, khususnya jika serikat buruh mampu memaksakan agar standar upah minimumnya dinaikkan dengan kenaikan yang tinggi untuk semua pekerjaannya. Padahal faktanya, manfaat yang diberikan pekerja itu berbeda-beda. Majikan dapat memberikan upah sesuai manfaat dari masing-masing pekerjaanya, sehingga tidak akan membebaninya lagi.